

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I secara rinci memaparkan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia pendidikan di era abad ke XXI memiliki peran penting untuk menyiapkan individu memiliki sejumlah keterampilan hidup yang bermakna dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tuntutan keterampilan yang dimiliki sangatlah berbeda dengan keterampilan di abad sebelumnya. Keterampilan yang harus dikuasai salah satunya adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial tidak hanya meliputi keterampilan interpersonal, keterampilan kolaborasi, keterampilan interaksi sosial dan lain sebagainya. Tetapi juga berkaitan dengan keterampilan dalam menyelesaikan masalah atau dikenal dengan istilah resolusi konflik. Beragam konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak semata-mata terjadi begitu saja. akan tetapi, disebabkan oleh adanya interaksi sosial yang kurang harmonis dan masing-masing pihak yang berkonflik ingin saling menang. Fenomena konflik tidak hanya terjadi pada kehidupan bermasyarakat tetapi juga menjadi perhatian khusus dalam dunia pendidikan. Beberapa tahun terakhir, konflik sering terjadi dikalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa kurangnya kemampuan resolusi konflik yang baik yang dimiliki oleh kalangan pelajar sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Beragam sumber konflik muncul karena adanya latar belakang budaya yang beragam, tingkat perkembangan biologis, mental, kognitif, kemampuan persepsi, pemahaman, kualifikasi nilai, kebutuhan, kepercayaan, sikap, pilihan dan karakter yang dimiliki oleh siswa secara alami dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan interpersonal. Selain itu, kecenderungan siswa dalam menggunakan strategi penyelesaian konflik yang bersifat destruktif dan tidak kooperatif memicu munculnya perilaku konflik seperti kekerasan fisik, makian, candaan, julukan, rasa cemburu (Ayas et al., 2010).

Konflik ditinjau dari perspektif teoretis dapat diartikan sebagai perjuangan atas nilai-nilai, klaim atas status dan kekuasaan, serta sumber daya yang bertujuan untuk menetralkan, melukai atau menghilangkan yang menjadi lawan atau saingan

dalam sebuah peristiwa (Obiagu, 2017). Konflik secara alami telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari namun akan menjadi krusial apabila tidak diselesaikan secara konstruktif. Salah satu ahli teori konflik Katz membedakan tiga sumber utama konflik yaitu ekonomi, nilai, dan kekuasaan (D. Katz, 1965). Sumber konflik lainnya muncul karena komunikasi yang tidak efektif, persepsi yang berbeda, bias emosional, dan prasangka (Fisher, 2000). Adanya situasi ketidaksetaraan atau ambiguitas kekuasaan (Kaufman, 2011). Serta sering dikaitkan dengan media, krisis sosial, situasi keluarga, sistem pendidikan serta minimnya sumber daya yang dimiliki guru dalam menangani masalah (Gil-Espinosa, 2021).

Ada beragam konflik yang terjadi di sekolah. Siew & Jones mengkategorikan situasi konflik yang ada di sekolah menjadi empat bagian yaitu konflik intragroup, intergroup, intrapersonal dan interpersonal (Siew & Jones, 2018). Perilaku konflik yang sering terjadi dikalangan siswa diantaranya saling mengejek atau pemanggilan nama yang tidak sesuai, konflik ketika berada di taman bermain, konflik pinjam meminjam barang atau kepemilikan, agresi dan perkelahian fisik, konflik dalam bidang akademik, dan konflik ketika sedang mengantre (Johnson & Johnson, 1996). Siswa yang tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik cenderung memaksa orang lain untuk tunduk dengan berbagai cara seperti mengulangi permintaan, mengancam, berperilaku agresi, perintah untuk menyerah, serta strategi kompetitif lainnya yang digunakan untuk memenangkan konflik tersebut. Kadang sebaliknya individu yang memiliki kemampuan resolusi konflik yang rendah justru menarik diri dari situasi dan hubungan karena adanya rasa ketidakpuasan dalam diri terhadap konflik yang dihadapi (Johnson & Johnson, 2002).

Lingkungan sekolah yang aman dan damai sudah selayaknya diperoleh melalui iklim kelas dengan standar pembelajaran yang tinggi sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk dapat berkembang secara maksimal. Akan tetapi, fakta di lapangan siswa terlalu sering menghadapi konflik tidak hanya saat berada di sekolah, tetapi juga ketika berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Gambaran konflik yang sering dihadapi yaitu remaja menjadi sasaran intimidasi baik verbal maupun non verbal, ejekan di media sosial, serta perselisihan yang

dirasa tidak cukup masuk akal untuk diperdebatkan tetapi mengakibatkan tindakan yang fatal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) tahun 2018 mengenai kasus perundungan di Indonesia yang terjadi pada pelajar berusia lima belas tahun sebanyak 41% pernah mengalami perundungan. Adapun jenis-jenis perundungannya yaitu dipukul dan disuruh-suruh oleh siswa lain (18%), siswa lain mengambil dan menghancurkan barang yang bukan miliknya (22%), diancam oleh siswa lain (14%), diejek oleh siswa lain (22%), siswa lain dengan sengaja mengucilkan (19%), dan siswa lain menyebarkan rumor (20%). Diperkuat juga oleh data KPAI melalui survey databoks diperoleh informasi bahwa selama tahun 2021 KPAI telah menerima pengaduan sebanyak 2.982 kasus. 1.138 kasus diantaranya dilaporkan bahwa anak telah menjadi korban kekerasan fisik maupun kekerasan psikis meliputi penganiayaan, *cybercrime*, tawuran hingga menjadi korban pembunuhan. Diperkuat juga oleh data dari hasil Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 bahwa kota Bandung termasuk salah satu kota yang dinilai kasus kekerasan pada anak lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 431 kasus. Sebanyak kasus yang telah dilaporkan, 155 kasus diantaranya anak mengalami kekerasan psikis. Hasil penelitian pada provinsi lain terkait profil resolusi konflik yang dilakukan oleh Ratu (2022) di kota Palu yang berkaitan dengan konsep dasar peta konflik, desain dan sumber konflik yang dimiliki siswa sekolah menengah kejuruan menunjukkan hasil sebanyak 99% siswa pernah mengalami konflik. Diperkuat oleh penelitian Huliselan (2017) mengenai profil kemampuan dasar resolusi konflik yang dilakukan pada siswa SMA di kota Ambon menunjukkan hasil terendah pada aspek kemampuan emosional dan kemampuan komunikasi. Hal ini berarti bahwa semakin banyak bukti mengenai rendahnya kemampuan resolusi konflik yang dimiliki remaja dikarenakan adanya ketidakberdayaan yang dimiliki remaja untuk mencegah perilaku maladaptif. Sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak konflik yang tidak diinginkan. Fakta lain mengenai rendahnya kemampuan resolusi konflik tidak hanya terjadi pada daerah rawan konflik tetapi juga di kota besar di wilayah Provinsi Jawa Barat juga memiliki resolusi konflik yang rendah. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nadya, Malihah & Wilodati di SMAN 2 Cimahi bahwa kemampuan menyelesaikan

konflik tergolong rendah terutama pada aspek pengelolaan emosi (Nadya et al., 2020).

Konflik sejatinya tidak selalu dipandang memberikan dampak negatif bagi individu. Ketika konflik dapat dipahami dengan baik serta dilakukan penyelesaian secara konstruktif, konflik akan menjadi sarana belajar bagi individu untuk berfikir secara kreatif dalam menghadapinya. Konflik yang diselesaikan secara konstruktif dapat membangun konsep diri dan dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi siswa untuk memperoleh pengalaman hidup secara nyata (Sudrajat & Saripah, 2016). Selain itu, dapat juga meningkatkan kepercayaan diri dan menciptakan suasana sekolah yang damai dan kondusif (Silver & Vermander, 2009; Türk, 2017). Sedangkan dampak negatif dari konflik yang diselesaikan dengan cara destruktif di sekolah mengarah pada perilaku kontraproduktif seperti kurangnya komunikasi, stres, ketidakhadiran di sekolah, menurunkan motivasi, dan hal lainnya yang dapat merusak hubungan sesama manusia dan membahayakan proses pendidikan (Saiti, 2015). Maka dari itu kemampuan resolusi konflik sangat diperlukan dan menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Berbagai upaya dapat dilakukan di sekolah agar peserta didik dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat di masa remajanya. Salah satu konflik yang tidak bisa dihindari di sekolah adalah konflik dengan teman sebaya. Maka dari itu, siswa harus memiliki kompetensi untuk menyelesaikan konflik secara tegas (Ayas et al., 2010). Pada kehidupan remaja, hubungan dengan teman sebaya dianggap penting terutama saat mengelola konflik yang dihadapi bersama dengan rekannya. Tidak sedikit siswa yang mengelola konflik secara destruktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, alasan ini dianggap bahwa kemampuan resolusi konflik penting dimiliki oleh siswa untuk menjadikan pribadinya mampu berkembang secara optimal dan membentuk identitas diri yang lebih sehat serta meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi (Crawford & Bodine, 1996). Bimbingan dan konseling memandang pendidikan resolusi konflik merupakan salah satu alternatif untuk memfasilitasi individu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara positif tanpa kekerasan. Purwoko (2015) menekankan bahwa individu yang sehat adalah individu yang bisa menyelesaikan konflik yang dihadapinya dari cara pandang destruktif menggunakan pola kompetitif menuju

penyelesaian masalah dari arah konstruktif ke arah kolaboratif. Individu diberikan ruang untuk duduk bersama saling berdialog dengan lawan konfliknya secara terbuka hingga mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan dari hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian permasalahan dapat diselesaikan dengan ramah dan terjalin hubungan yang damai dan harmonis.

Dalam permendikbud no 111 tahun 2014 pasal 2 menerangkan bahwa layanan bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan salah satunya berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah. Maka dari itu, pentingnya memiliki kemampuan resolusi konflik sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mengidentifikasi pendekatan terhadap konflik dan menghasilkan solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Tidak hanya itu, dalam panduan operasional penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan salah satu tujuannya adalah sebagai upaya membantu siswa dalam mencapai tugas perkembangan baik dari aspek sosial maupun emosional. Siswa pada usia remaja, emosinya cenderung tidak stabil dan memiliki karakteristik sikap yang menentang terhadap otoritas sehingga kondisi ini dapat memicu timbulnya perilaku yang maladaptif. Maka dari itu, sejalan dengan aspek perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik (SKKPD) mengenai keasadaran tanggung jawab sosial, resolusi konflik berperan penting agar siswa mampu mencapai tugas perkembangan dan memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Beragam penelitian terkait pendidikan resolusi konflik telah dilakukan diberbagai jenjang pendidikan dari mulai jenjang taman kakak-kanak (Musfiroh, 2011; Zaeni, 2020), Sekolah Dasar (Ayas et al., 2010; Bell et al., 2000; Johnson & Johnson, 2002; Lane-Garon et al., 2012; Schellenberg et al., 2007; Turnuklu et al., 2009), Sekolah Menengah Pertama (Patra Ritiauw et al., 2018; Van Slyck, 2019), Sekolah Menengah Atas (Huliselan, 2017; Jupriadi, 2022; Nawantara, 2021; Purwoko, 2015; Turnuklu et al., 2010), dan Sekolah Menengah Kejuruan (Ratu, 2022; Sudrajat & Saripah, 2016), hingga jenjang Perguruan Tinggi (Malihah et al., 2015; Nkang & Uwah, 2021; Sartika, 2017).

Kajian pengembangan pendidikan resolusi konflik sejauh ini sudah banyak dilakukan dari mulai pengembangan konsep hingga intervensi. Beragam model intervensi dan program juga telah berhasil dilakukan untuk mencegah konflik yang terjadi di lingkungan sekolah diantaranya model konseling resolusi konflik komprehensif (Bodine, 1994; Sudrajat & Saripah, 2016), konseling resolusi konflik berbasis kebudayaan nosarara nosabatutu (Ratu, 2022), layanan konseling resolusi konflik dengan beragam teknik seperti psikodrama (Purnamasari & Maulia, 2019) *healing story dengan media high school musical film* (Hidayat, 2011). Serta pengembangan program pelatihan seperti program sosial-emosional anak usia dini yang damai (Sandy & Boardman, 2000), Program penyelesaian konflik secara kreatif (Aber et al., 1996), program mediasi sebaya (Benson & Benson, 1993; Daunic et al., 2000; Lane & McWhirter, 1992), Program keterampilan negoisasi konflik (United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific., 2003)

Program pengembangan kemampuan resolusi konflik dapat membantu sekolah mempromosikan perubahan perilaku individu yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan sistemik. Turk (2017) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan keterampilan resolusi konflik yaitu empati, keterampilan pengaturan diri dan persepsi *self-efficacy*. Pendidikan resolusi konflik penting bagi individu untuk membangun kompetensi keterampilan hidup, sekolah, ruang kelas, dan komunitas sekolah, untuk mendukung lingkungan belajar yang efektif, aman dan damai (Association for Conflict Resolution, 2002). Program pendidikan resolusi konflik memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang sifat konflik, dinamika kekuasaan dan pengaruh yang beroperasi dalam konflik, dan peran budaya dalam melihat dan menanggapi konflik (Jones, 2004)

Berdasarkan kajian penelitian tentang pendidikan resolusi konflik dan fakta di lapangan bahwa sampai saat ini penggunaan metode tradisional seperti hukuman untuk menyelesaikan konflik masih terjadi di sekolah (Akacan & Bengisoy, 2015; Akhmad & Kartadinata, 2016). Hal ini tidak cukup untuk menyediakan lingkungan yang sistematis dan damai di sekolah. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada empat siswa di SMKN 1 Pangandaran dengan

beragam latar belakang yang berbeda diperoleh informasi bahwa konflik yang terjadi tidak hanya dengan teman sebaya, tetapi juga dengan kakak kelas, maupun guru. Konflik terjadi tidak hanya dikalangan laki-laki tetapi juga terjadi pada perempuan. Wawancara yang di lakukan kepada tiga orang siswa laki-laki dari jurusan RPL dan TBSM mengatakan bahwa hal yang memicu munculnya konflik yaitu berawal dari sikap mengejek, kurangnya sikap sopan santun, adanya kesalah pahaman serta adanya rasa senioritas yang tinggi hingga hal lainnya yang dapat memicu perkelahian. Berbeda dengan konflik yang terjadi di kalangan perempuan, wawancara yang dilakukan pada siswa dari jurusan APHPI yaitu konflik yang terjadi dikalangan perempuan cenderung membentuk kelompok atau biasa dikenal geng sekolah, timbulnya perasaan tersaingi sesama perempuan, saling sindir di media sosial serta adanya rasa senioritas yang tinggi terhadap adik kelas.

Diperkuat juga dengan data yang diperoleh melalui studi pendahuluan yang dilakukan menggunakan metode survey, dari total jumlah siswa kelas XI yang berasal dari tujuh jurusan yang berbeda berjumlah 360 siswa adapun yang mengisi angket kemampuan resolusi konflik sebanyak 160 siswa dari jurusan dibawah naungan teknik komputer dan informatika yaitu jurusan rekayasa perangkat lunak (RPL) dan teknik komputer dan jaringan (TKJ). Dari instrument kemampuan resolusi konflik yang telah disebar diperoleh gambaran kemampuan resolusi konflik siswa SMK paling banyak berada pada kategori cukup mampu sebanyak 61,25 % dengan jumlah 98 siswa, kemudian berada pada kategori mampu sebanyak 25 % dengan jumlah 40 siswa dan terakhir berada pada kategori kurang mampu sebanyak 13,75 % dengan jumlah 22 siswa. Selain itu dari fakta di lapangan siswa lebih banyak menyelesaikan konflik yang dihadapi dengan cara yang destruktif. Hal ini disebabkan oleh faktor rendahnya kemampuan resolusi konflik pada siswa terutama dalam mengelola emosi (Nadya et al., 2020). Dan adanya kecenderungan karakteristik dari individu yang tinggal di daerah pesisir pantai dengan iklim panas cenderung memiliki sifat keras (Maufur, 2016).

Salah satu upaya untuk membangun atau membuat perdamaian di sekolah yaitu dengan memperkenalkan dan menanamkan rasa damai pada diri siswa dengan cara saling menghargai adanya keanekaragaman budaya pada setiap diri individu atau dikenal dengan istilah *cultivating peace* (Seameo-innotech, 2007). Dengan

mengajarkan kepada siswa tentang nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan serta komitmen terhadap anti kekerasan dan hak asasi manusia diharapkan dapat menekan angka perilaku konflik di sekolah yang disampaikan melalui program bimbingan *cultivating peace* yang memperkenalkan sikap empati, kerja sama, dan toleransi agar siswa mampu mengatasi masalah tanpa kekerasan (Elmi, 2010). Maka dari itu berdasarkan paparan di atas, maka perlu adanya program bimbingan *cultivating peace* untuk mengembangkan kemampuan resolusi konflik siswa. Program ini sebagai salah satu bekal bagi siswa dalam memahami, mengelola dan menyelesaikan konflik tidak hanya konflik di sekolah tetapi juga ketika sudah terjun pada dunia kerja ataupun masyarakat. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan resolusi konflik siswa sekolah menengah kejuruan dengan menggunakan program bimbingan *cultivating peace*. Kebaruan dalam penelitian ini adalah bahwa program yang dikembangkan tidak jauh berbeda dengan program-program yang sudah ada hanya saja program bimbingan *cultivating peace* ini lebih disesuaikan dengan karakteristik sekolah dengan letak geografis berada di daerah pesisir. Harapannya adalah ketika siswa memiliki kemampuan resolusi konflik yang baik dalam mengatasi konflik yang dihadapinya, maka insiden perkelahian, tindak kekerasan, senioritas serta intensitas konflik lainnya akan berkurang.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Repjabar.republika.co.id sudah ada kurang lebih sekitar tiga ratus data pengaduan mengenai kekerasan yang tercatat di provinsi Jawa Barat. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Borualogo & Gumilang bahwa kasus perundungan banyak terjadi di Jawa Barat dan tersebar di 27 kabupaten/ kota termasuk wilayah kabupaten Pangandaran (Borualogo & Gumilang, 2019). Hasil studi pendahuluan yang dilakukan kepada tiga orang guru bimbingan dan konseling di SMKN 1 Pangandaran Provinsi Jawa Barat bahwa konflik yang terjadi di lingkungan sekolah adalah konflik interpersonal yaitu *bullying* baik itu verbal maupun non verbal. Selain itu pada tahun 2021 juga pernah terjadi tawuran pelajar antar jurusan di sekolah. Selama ini guru BK dalam menangani konflik di atas cenderung mengarah pada pemberian nasihat, konferensi kasus, dan membuat kesepakatan melalui surat perjanjian yang dibuat oleh pihak

sekolah dengan siswa yang berisi sebuah penegasan jika mengulangi perbuatan tersebut maka dapat dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa belum menyentuh pada pemberian layanan bimbingan resolusi konflik, hal tersebut menandakan belum adanya pendidikan resolusi konflik yang terintegrasi dengan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada beragam bentuk konflik yang terjadi di sekolah yaitu perundungan baik verbal maupun non verbal, pemalakan, saling mengejek, pemanggilan nama yang tidak sesuai dengan namanya, adanya provokasi, serta adanya sikap tidak saling menghormati dan menghargai antara kakak kelas dengan adik kelas. Hal ini disebabkan oleh adanya bias persepsi yang mengakibatkan munculnya emosi yang tidak terkendali. Selain itu, kebanyakan pendidik dalam menyelesaikan konflik lebih kepada pemberian hukuman dan berujung pada pembuatan perjanjian. Sebagian pendidik menganggap konflik yang terjadi di lingkungan sekolah adalah hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal jika dibiarkan hal tersebut dapat berakibat fatal bagi perkembangan siswa. Oleh karena itu maksud penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan resolusi konflik.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah program bimbingan *cultivating peace* efektif untuk mengembangkan kemampuan resolusi konflik siswa SMK?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas program bimbingan *cultivating peace* untuk mengembangkan kemampuan resolusi konflik siswa SMK.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling khususnya mengenai program bimbingan *cultivating peace* untuk mengembangkan kemampuan resolusi konflik

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian sebagai berikut yaitu:

- 1) Bagi guru bimbingan dan konseling diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai upaya mengembangkan dan menanggulangi masalah siswa di SMK khususnya dalam mengembangkan kemampuan resolusi konflik
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau sumber kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya.